



PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT KELASIB

TURUNAN
RENCANA KERJA
2021





TURUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2021



PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT NOMOR : W7.U2/ 888 /SK/KP.01.1/2/ 2021

tentang

PENETAPAN TURUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- Menimbang :
1. Bawa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 2. Bawa sebagai upaya mendukung peningkatan Pelayanan Publik dan Kegiatan Anti Korupsi dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PENETAPAN TURUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
- PERTAMA :
- Turunan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sintang, untuk menunjang Peningkatan Layanan Publik serta mendukung kegiatan anti Korupsi
- KEDUA :
- Bawa dalam melakukan penetapan turunan rencana kerja bertujuan untuk lebih menyelaraskan dan menjamin keberlangsungan Kegiatan sesuai dengan jadwal dengan hasil dan atau keluaran yang diharapkan selama periode satu tahun

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



TURUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik	a. Penetapan Standart Pelayanan b. Budaya Pelayanan Prima	✓ ✓	- ✓	- ✓	- ✓
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Anti Korupsi	a. Pengendalian Gratifikasi b. Penerapan SPIP c. Pengaduan Masyarakat d. WBS e. Benturan Kepnittingan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SASARAN STRATEGIS I
TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik	a. Penetapan Standart Pelayanan b. Budaya Pelayanan Prima	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓

AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
	TW I	TW II	TW III	TW IV				
Menetapkan standart pelayanan dengan menerbitkan SK	✓				• SK KPN tentang standart pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	-
Membuat maklumat pelayanan dan menempatkan maklumat pelayanan diarea publik	✓				• Banner maklumat pelayanan yang ditempatkan diarea publik			
Membuat SOP pelaksanaan standart pelayanan	✓				• SOP standart pelayanan • Reviu SOP standart pelayanan			
Melakukan sosialisasi/pelatihan budaya pelayanan prima	✓		✓		• Undangan, absensi, notulen dan foto			
Memberikan reward and punishment kepada petugas pelayanan			✓		• SK Mekanisme reward and punishment • SK TIM reward and punishment • Undangan, absensi, notulen dan foto kegiatan rapat reward and punishment • SK Penetapan reward and punishment • Piagam penghargaan			

SASARAN STRATEGIS II
TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KEGIATAN ANTI KORUPSI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
2	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Anti Korupsi	a. Pengendalian Gratifikasi	✓	-	-	-
		b. Penerapan SPIP	✓	-	-	-
		c. Pengaduan Masyarakat	✓	✓	✓	✓
		d. WBS	✓	✓	✓	✓
		e. Benturan Kepentingan	✓	✓	✓	✓

AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
	TW I	TW II	TW III	TW IV				
Pelaksanaan Public Campaign	✓				• Foto kegiatan kampanye anti gratifikasi • Banner/spanduk anti gratifikasi	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM	PENINGKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANTI GRATIFIKASI	-
Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi	✓				• SK KPN tentang Unit Pengendalian Gratifikasi • Pemasangan CCTV diseluruh area • Adanya area ruang tamu terbuka	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM	PENINGKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANTI GRATIFIKASI	-

Menerapkan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah				<ul style="list-style-type: none"> • Undangan, notulen, absensi, foto kegiatan sosialisasi SPIP • SK KPN tentang TIM SPIP • Laporan monev pengawasan • Dokumen identifikasi resiko • Dokumen analisis resiko • Laporan pengendalian resiko yang telah diidentifikasi 	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM	PENINGKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANTI GRATIFIKASI	
Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan penggunaan dan pengelolaan aplikasi SIWAS • SK KPN tentang petugas meja pengaduan dan informasi • Spanduk, banner, brosur tentang informasi sarana pengaduan • Laporan/Data pengaduan masyarakat melalui aplikasi siwas • Laporan monitoring, evaluasi dan tindaklanjut pengaduan masyarakat 	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM	PENINGKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANTI GRATIFIKASI	
Menerapkan Whistleblowing System (WBS)	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen internalisasi WBS • Penggunaan aplikasi SIWAS dengan user Pimpinan atau petugas yang ditunjuk • Laporan evaluasi penerapan WBS 	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM	PENINGKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANTI GRATIFIKASI	
Menerapkan Benturan Kepentingan	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • SK KPN tentang Benturan Kepentingan • Dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan • Undangan, notulen, absensi dan foto kegiatan sosialisasi benturan kepentingan • Formulir penanganan benturan kepentingan • Dokumen surat pernyataan bebas benturan kepentingan • Laporan monitoring dan evaluasi penerapan benturan kepentingan 	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM	PENINGKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANTI GRATIFIKASI	

Ditetapkan di : Sungailiat
 Pada Tanggal 24 februari 2021
 KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

